

**DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS SKPD
TAHUN 2016 – 2021**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2. Sumber Daya	24
2.3. Kinerja Pelayanan	26
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...	29
3.1. Identifikasi Permasalahan	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	31
3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis	34
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	39
4.1. Visi dan Misi	39
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	40
4.3. Strategi dan Kebijakan	45
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	46
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	47
BAB VII PENUTUP.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.5. LATAR BELAKANG

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jonto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan

yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun dan menetapkan Renstra BPMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra BPMD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPMD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Gambaran tentang hubungan antara Renstra BPMD Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan.

1.6. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 13) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025

- 17) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan;
- 20) Keputusan Bupati Nomor : 64 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lamongan

1.7. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Bapemas Kabupaten Lamongan merupakan dokumen strategis 5 (lima) tahun Tahun 2016 - 2021 sebagai bagian dari sistem RPJP dan RPJM Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021.

1.3.1. MAKSUD

Renstra Bapemas Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, dimaksudkan sebagai pedoman dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat.

1.3.2. TUJUAN

Rencana Strategis Bapemas bertujuan untuk memperoleh pedoman sebagai pegangan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar Belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya serta kinerja pelayanan.

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Kementerian / Lembaga (K/L) dan renstra serta penentuan isu – isu strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DPMD KABUPATEN LAMONGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat indicator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang secara langsung menunjukkan capaian kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan Saran dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.4. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 KEDUDUKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai bagian dari Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat dan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2.1.2. TUGAS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DPMD mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.1.3 FUNGSI

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai;

- a. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa
5. Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomian Masyarakat Desa
6. Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa
7. Sub Bagan Umum
8. Sub Bagian Program
9. Sub Bagian Keuangan
10. Seksi Bidang Pemerintahan Desa
11. Seksi Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Sumber Daya Manusia (SDM)
12. Seksi Bidang Evaluasi Perkembangan Desa
13. Seksi Bidang Infrastruktur Dasar Perdesaan dan Penataan Perumahan Pemukiman
14. Seksi Bidang Sumber Daya Alam dan Kawasan Terpadu
15. Seksi Bidang Pembinaan Teknologi Tepat Guna
16. Seksi Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
17. Seksi Bidang Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan
18. Seksi Bidang Bantuan Pembangunan dan Pembina Lembaga Ekonomi Masyarakat
19. Seksi Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat
20. Seksi Bidang Adat Istiadat, Tradisi, dan Budaya Masyarakat
21. Seksi Bidang Partisipasi dan Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

2.1.4.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi ;

- a. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan, keuangan, dan keprotokolan serta mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;

- c. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan keprotokolan dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- e. pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan program dinas;
- f. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dinas;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dinas;
- h. pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja dan keuangan dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.4.3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas :

- a. penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, produk hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas;
- b. menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP, DUK, sumpah/janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi ASN dan lainnya;
- c. menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis pakai dinas;
- d. melakukan penyusunan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan;
- e. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penerimaan, pendistribusian, dan penggandaan naskah-naskah dinas;
- f. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan;

- g. melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan;
- h. melakukan administrasi kepegawaian;
- i. menyusun rancangan usulan produk hukum daerah;
- j. melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.4. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program dan kegiatan dinas;
- b. menyusun perencanaan kinerja, program dan kegiatan dinas;
- c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dan kegiatan dinas;
- d. menyusun laporan kinerja, program dan kegiatan dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas :

- a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset dinas;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset dinas;
dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.6. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa

Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan mengenai pemerintahan desa meliputi struktur organisasi, tata kelola, anggaran dan pendapatan belanja desa, akuntabilitas dan pembangunan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam bidang pemerintahan desa dan kelembagaan desa;
- c. pelaksanaan fasilitasi, supervisi, evaluasi dan membuat pedoman pengelolaan data profil desa;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan desa;
- e. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan di desa;
- f. pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia pemerintahan desa;
- g. pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan asset desa; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.4.8. Seksi Bidang Pemerintahan Desa

Seksi Pemerintahan Desa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan kemampuan dan ketrampilan Kepala Desa dan Perangkat desa;
- b. mengadakan pembinaan tentang Penyusunan peraturan desa dan keputusan kepala desa;

- c. melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan desa (BPD);
- d. melaksanakan pembinaan dan pelaporan perdes APBDesa, Perubahan APBDesa serta pelaporan pertanggungjawaban APBDesa dan APBDesa;
- e. merencanakan dan menyiapkan pembinaan,fasilitasi dan regulasi dalam penyaluran dana pembangunan desa (Alokasi Dana Desa)
- f. pembinaan, pengawasan, dan supervise system informasi keuangan desa (SIMKUDES)
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.4.8. Seksi Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan SDM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan dan SDM;
- b. fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat desa;
- c. fasilitasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa;
- d. menganalisa data mengenai kegiatan lembaga kemasyarakatan (LPMD/LPMK) untuk monitoring dan evaluasi kelembagaan desa dan kelurahan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.4.9. Seksi Bidang Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa

Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Lomba Desa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas :

- a. melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan lomba desa inovatif;

- b. menyusun program kegiatan fasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan desa;
- c. menyusun program kegiatan lomba desa terkait dengan penyelenggaraan tata kelola, inovasi dan pelayanan desa;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, pendataan, monitoring tentang potensi perkembangan desa;
- e. menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan lomba desa; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1.4.10. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi mengenai pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengembangan sumber daya desa;
- b. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya desa;
- c. pelaksanaan program pengembangan SDD melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan SDD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas fungsinya.

2.1.4.11. Seksi Bidang Sumber Daya Alam Dan Kawasan Terpadu

Seksi Sumber Daya Alam dan Kawasan Terpadu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan bidang sumber daya alam dan kawasan terpadu;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kegiatan bidang sumber daya alam dan kawasan terpadu;
- c. menyusun data sumber daya alam milik desa dan memetakan potensi pemanfaatannya;
- d. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam; dan
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam milik desa; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.12. Seksi Bidang Infrastruktur Dasar Pedesaan Dan Penataan Perumahan Pemukiman

Seksi Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Penataan Perumahan Pemukiman kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana desa ;
- b. menyiapkan bahan pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan ;
- c. menyiapkan bahan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana desa ;
- d. menyiapkan data-data pengembangan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- e. menyusun bahan kegiatan penataan perumahan pemukiman;

- f. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dalam rangka peningkatan infrastruktur dasar pedesaan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan pedesaan;
 - h. menyiapkan fasilitas rehabilitasi lingkungan pemukiman, lingkungan alam dan lingkungan buatan;
 - i. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana desa dan kelurahan;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.13. Seksi Bidang Pembinaan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengkajian teknologi tepat guna dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas bidang sosial budaya dan sumber daya alam;
- b. menyiapkan rencana strategis percepatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. menyiapkan teknologi tepat guna sebagai wujud pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi rehabilitasi lingkungan pemukiman, lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- e. melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, Instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- f. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya ;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan;
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Alam.

2.1.4.14. Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa

Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi mengenai Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. menyusun pedoman dan merumuskan kebijakan dibidang pengembangan lembaga ekonomimasyarakat desa;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa;
- c. memfasilitasi penguatan dan tata kelola pengembangan lembaga ekonomi desa bagi masyarakat;
- d. merencanakan dan melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya lainnya dalam rangka pengembangan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;
- e. melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa;
- f. mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat Desa termasuk dalam usaha maupun lembaga keuangan desa;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.15. Seksi Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat kepada Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan usaha ekonomi masyarakat;

- b. memfasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;
- c. menyiapkan bahan analisa hasil pemantauan untuk bahan kajian dalam rangka peningkatan usaha ekonomi desa;
- d. menyusun bahan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pengembangan usaha ekonomi desa;
- f. menyusun bahan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pengembangan pemberdayaan usaha masyarakat dan desa;
- g. menyiapkan bahan koordinasi untuk mengembangkan potensi usaha desa dengan pihak terkait dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa;
- h. fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan BUMDesa
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.16. Seksi Bidang Bantuan Pembangunan Dan Pembina Lembaga Ekonomi Masyarakat

Seksi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan kepada Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja bidang penanggulangan dan pengentasan masyarakat miskin;
- b. menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan bidang penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
- c. menyalurkan setiap bantuan-bantuan bagi masyarakat miskin dan upaya pengentasan kemiskinan;
- d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin;

- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta melaporkan perkembangan penanggulangan dan upaya pengentasan kemiskinan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.17. Seksi Bidang Bantuan Pembangunan Dan Pembina Lembaga Ekonomi Masyarakat

Seksi Bantuan Pembangunan dan Pembina Lembaga Ekonomi Masyarakat kepada Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan bantuan pembangunan di desa dan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat;
- b. melaksanakan program kegiatan bantuan pembangunan dan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat dan desa;
- c. Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan pembangunan dan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat dan desa;
- d. Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan pasar desa
- e. Fasilitasi dan supervise pengembangan pasar desa
- f. menyusun dan memfasilitasi kegiatan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat;
- g. menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya terhadap berbagai bantuan atas pembangunan di desa;
- h. menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya terhadap kegiatan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.18. Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa

Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,

pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi mengenai peningkatan keswadayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang partisipasi, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat;
- b. pelaksanaan program kegiatan pengembangan partisipasi, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. persiapan kegiatan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan partisipasi masyarakat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- e. peningkatan kerja sama dengan *stakholder*, baik perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pengembangan partisipasi dan kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
- f. Peningkatan partisipasi dan peran perempuan di perdesaan.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas fungsinya.

2.1.4.19. Seksi Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat

Seksi Pembinaan Partisipasi Masyarakat kepada Kepala Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa, mempunyai tugas :

- a. penyusunan program kegiatan bidang pengembangan partisipasi, swadaya masyarakat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pendataan, monitoring tentang potensi sumberdaya dan swadaya masyarakat;
- c. persiapan bahan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya masyarakat;

- d. penyusunan bahan fasilitasi peningkatan gerakan partisipasi, swadaya masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan swadaya masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengembangan partisipasi, swadaya masyarakat;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.20. Seksi Bidang Adat Istiadat, Tradisi Dan Budaya Masyarakat

Seksi Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat kepada Kepala Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan bidang pelestarian adat istiadat dan pengembangan budaya masyarakat;
- b. menyusun kebijakan fasilitasi pelaksanaan pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan kesadaran sosial masyarakat, tradisi dan nilai budaya masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi guna melestarikan tradisi dan nilai budaya masyarakat;
- e. menyiapkan kegiatan gerakan masyarakat dalam pelestarian adat istiadat serta budaya masyarakat;
- f. menyusun bahan pedoman bimbingan pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.21. Seksi Bidang Partisipasi Dan Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan

Seksi Partisipasi dan Peran Perempuan di Pedesaan kepada Kepala Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan program kegiatan bidang partisipasi dan peran perempuan di pedesaan;
- b. menyiapkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan peran perempuan di pedesaan;
- c. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. melakukan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kelembagaan posyandu;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil kegiatan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan perempuan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5. SUMBER DAYA

Sumber daya yang dimiliki DPMD Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal dapat dijelaskan sebagaimana berikut ;

1. Sumber Daya Manusia / Personil :

NO	JABATAN	JML	PANGKAT/GOL/ RUANG	JML	PENDIDIKAN FORMAL	JML	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1	Pembina Tk. I (IV/a)	1	S1	1	
2	Sekretaris	1	Pembina (IV/a)	1	S1	1	
3	Kabid	4	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S2	1	
Pembina (IV/a)			3	S2	3		
Penata Tk.I (III/d)			1	S1	2		
4	Kasubid	12	Penata Tk.I (III/d)	7	S1	7	
Penata (III/c)			2	S1	2		
			2	S2	2		
Penata Muda Tk.I(III/b)			1	S1	1		

5	Kasubag	3	Penata Tk.I (III/b)	1	S1	1	
			Penata Tk.I (III/c)	1	S2	1	
			Penata Muda Tk.I(III/b)	1	S1	1	
6	Staf	6	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	S1	2	
				2	SLTA	2	
			Pengatur Muda Tk.I (II/b)	2	SLTA	2	
7	Honoror	26		15	S1	15	
				11	SLTA	11	
	Jumlah Total	53		53		53	

Sumber Data dari Data Pegawai 2017

2. Sarana dan Prasarana :

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Mobil Roda 4	7	
2	Motor Roda 2	17	
3	UPS	0	
4	Mesin Ketik	4	
5	Calculator	8	
6	Mesin Stensil	1	
7	Feling Kabinet	10	
8	Rak Besi	1	
9	Rak Kayu	1	
10	Almari Besi	21	
11	Brankas	2	
12	Whiteboard	2	
13	Almari Kayu	16	

14	Kursi Kerja	106	
15	Meja Kerja	64	
16	Meja Kursi Tamu	34	
17	Kipas angin	5	
18	Kamera	2	
19	Meja Rapat	15	
20	Telepon	2	
21	Computer	25	
22	Tabung Pemadam Kebakaran	3	
23	Intercom	2	
24	Printer	31	
25	Pompa air	1	
26	Tempat sampah besar	1	
27	Overhead	1	
28	AC	23	
29	Soundsystem	1	
30	Handycam	1	
31	Dispenser	0	
32	LCD	3	
33	Laptop	19	
34	Kamera Digital	10	

2.6. KINERJA PELAYANAN

Tingkat pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya telah diselaraskan dengan pencapaian Program dan Kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri nomor 59 tahun 2007, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 sehingga dapat dapat diketahui capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan, sebagai berikut :

1. Program Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Program RPJMD	Program PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Desa yang Mandiri	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	- Jumlah Desa Mandiri

2. Target Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	Target Akhir (2021)
- Terwujudnya Desa yang Mandiri	- Jumlah Desa Mandiri	1	4	5	6	7	8	8

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.4. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Berbagai persoalan pembangunan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah, salah satunya disebabkan kurang baiknya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan. Pedesaan yang menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar masyarakat kurang berfungsi sebagai basis dalam penyiapan sumber daya manusia yang andal dengan pengembangan sumber daya alam dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang pembangunan. Pembangunan pedesaan yang baik akan memberikan peluang bagi setiap individu yang ada di dalamnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sejalan dengan peluang yang tercipta atau diciptakan pemerintah dan pihak lain.

Pembangunan pedesaan kurang dilandasi oleh upaya yang sistematis untuk mengembangkan kapasitas penduduk sebagai individu dan sebagai bagian dari suatu komunitas. Keadaan ini menyebabkan tenaga kerja yang terpaksa keluar dari sektor formal memasuki sektor informal. Pengembangan industri juga tidak didasarkan pada sumber daya yang banyak dimiliki masyarakat pedesaan dan terjebak pada industri yang bergantung pada bahan baku impor dan yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah.

Pelaksana pemerintahan pada berbagai level kurang memiliki keinginan yang kuat untuk mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Aparat pemerintah lebih bertindak sebagai pelaksana pembangunan dengan menjadikan masyarakat pedesaan sebagai objek pembangunan. Ilmuwan sibuk memperdebatkan pola pendekatan yang sebaiknya digunakan dalam pembangunan masyarakat desa, dan sulit mencari titik temu dengan pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, keputusan Pemerintah untuk melakukan penyeragaman dalam pembangunan pedesaan tidaklah terlalu keliru karena masyarakat berada

dalam kondisi yang relatif sama secara individu dan siap untuk bekerja secara komunitas menyambut inisiatif pemerintah atau partner pemerintah dalam pembangunan.

Berbagai gerakan bersama yang dicanangkan pemerintah kurang terpola secara baik, terutama dalam menunjang ketersediaan infrastruktur di pedesaan. Selain itu, pengembangan semangat untuk maju atau aspek mentalitas kurang tergarap sebagaimana mestinya. Masih banyak masyarakat yang menggantungkan harapan terhadap kegiatan pembangunan di masing – masing desa kepada pemerintah dan kurangnya kesadaran untuk berswadaya dan menjaga hasil – hasil pembangunan serta semakin menurunnya kegotong royongan masyarakat desa karena dipengaruhi adanya pencukupan kebutuhan sehari – hari. Kondisi ini menyebabkan semangat untuk maju dan bekerja keras dalam mencapai yang diinginkan tidak menjadi landasan dalam setiap aktivitas masyarakat. Akibat lebih jauh, sumber daya manusia di pedesaan umumnya memiliki kemandirian yang rendah dan lebih banyak menjadi beban pembangunan ketimbang sebagai modal pembangunan.

Berbagai keliruan dalam memilih pendekatan pembangunan pedesaan menyebabkan kehilangan momentum yang paling berharga dalam pembangunan pedesaan. Akibatnya, kondisi infrastruktur makin kurang terpelihara karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membangun dan merawat infrastruktur yang ada, serta tidak adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap infrastruktur yang ada karena mereka tidak menghayati sulitnya membangun atau memelihara infrastruktur. Disisi lain masyarakat pedesaan kurang siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di sekitarnya sehingga hanya segelintir penduduk yang dapat memanfaatkan peluang yang ada. Kehidupan masyarakat yang makin heterogen dan individualis menyebabkan mereka kurang respons terhadap berbagai gerakan bersama pembangunan desa. Dalam kondisi seperti ini, hanya upaya semipartisipatif dan partisipatif yang mungkin dapat dilaksanakan. Upaya ini memerlukan kejelian dan keseriusan berbagai pihak terkait, dan itu sulit didapatkan pada era sekarang ini. Akibatnya, berbagai

program pembangunan pedesaan yang dicanangkan pemerintah sering diiringi dengan adanya kegagalan dan kurang maksimal.

Pertanyaan menarik yang perlu dijawab adalah bagaimana membangun momentum baru bagi pembangunan pedesaan ke depan. Dalam kondisi kehidupan masyarakat pedesaan yang makin heterogen, sementara kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan pedesaan makin terbatas, maka upaya percepatan pembangunan pedesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama. Pada situasi semacam ini, hanya melalui partisipasi aktif masyarakat desa memungkinkan dilakukan perubahan mendasar dalam gerak pembangunan desa. Hal ini mengandung arti bahwa pengembangan pedesaan hanya mungkin dilakukan bila ada faktor pengikat yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu, diperlukan berbagai prasyarat, salah satunya terkait dengan upaya membangun momentum baru bagi tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat. Langkah utama yang perlu digali dan dikembangkan dalam upaya mengembangkan momentum baru pembangunan pedesaan adalah pengembangan sumber daya manusia pedesaan dan semua potensi desa yang dimilikinya (*local genius*) secara terarah dalam berbagai jangka waktu, untuk dilakukan pemberdayaan berkualitas.

3.5. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa

kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah:

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Terwujudnya** terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
- 2) **Lamongan** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
- 3) **Lebih Sejahtera** dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
- 4) **Lebih Berdaya saing** dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, “**Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing**” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 5.

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (lima) dan Tujuan 6 (enam) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

3.6. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Gambaran dari identifikasi permasalahan diatas, merupakan permasalahan umum yang harus dihadapi oleh PERANGKAT DAERAH Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan, secara khusus permasalahan

yang akan dihadapi berdasar pada tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rendahnya penggunaan database desa

Upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan data base desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa.

2. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan.

Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

3. Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan lingkungannya melalui beberapa program pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap. Kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah usia fisiknya cepat, hal ini disebabkan struktur tanah yang mudah bergerak, kualitasnya kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.

4. Menurunnya nilai – nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal

Konstruksi sosial masyarakat desa yang dulu ada, seperti : teposeliro, tolong menolong, gotong royong dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai – nilai social (moral) masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan yang menghargai adat dan istiadat budaya local setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

5. Lemahnya peran serta perempuan perdesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan

Pengarusutamaan dan kesetaraan gender merupakan ruang terbuka bagi perempuan dalam mengambil posisi dan peran sosial kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Fikiran yang menempatkan perempuan terbatas peran sosialnya terutama di perdesaan harus diluruskan dan di beri pemahaman yang tepat melalui kegiatan dan sosialisasi pengarusutamaan dan kesetaraan gender guna berpartisipasi aktif dalam membangun desanya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan derajat hidup keluarga dan perlindungan perempuan serta anak.

6. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat

Peningkatan perekonomian desa melalui Dinas Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator

utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Beberapa program yang sudah bergulir seperti, PNPM mandiri perdesaan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan sejenisnya, yang didalamnya terdapat kegiatan usaha mikro keuangan melalui lembaga – lembaga keuangan desa atau kelompok masyarakat terdapat dana bergulir yang dikelola langsung oleh masyarakat, menyisihkan beberapa persoalan pengelolaannya, diantaranya : dana bergulir menjadi stagnan dan bahkan tidak teridentifikasi keberadaannya yang menyebabkan usaha ekonomi masyarakat menjadi tidak produktif dan kurang berkembang.

7. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Tehnologi Tepat Guna serta lingkungan hidup

Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan dan sumberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (local genius) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan.

Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, yang dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

8. Pemerintahan Yang Baik

pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance*. Dalam membangun *good governance* bukan serta merta memperbaiki kondisi instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam *good governance* tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen (warganegara), masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan.

Efektivitas dan efisiensi penerapan *good governance* dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu:

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan maka dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

Misi ke-1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan;

Misi ke-2

Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah;

Misi ke-3

Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan;

Misi ke-4

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

Misi ke-5

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal;

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah Misi ke-5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu “*Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal* “. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 ditetapkan tujuan : “*Terwujudnya Desa yang Mandiri* “ dengan 1 (satu) sasaran strategis : “*Meningkatnya Status Desa Mandiri* “ dan indikator sasaran strategisnya “*Jumlah Desa Mandiri* “

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Untuk merealisasikan misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran indikator sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan.

Dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

VISI :

“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING ”

MISI 5 :

“ MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL “

TUJUAN 6:

“ MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG AMAN, TENTRAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI-NILAI AGAMA, HUKUM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGGANGGURAN “

SASARAN :

“TERWUJUDNYA DESA YANG MANDIRI”

INDIKATOR :

“ JUMLAH DESA MANDIRI “

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan dijabarkan dalam rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:

1. Visi :

“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”

2. Misi :

“ MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL”

3. TUJUAN :

“ MEWUJUDKAN DESA MANDIRI “

4. SASARAN :

“ MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA “

5. INDIKATOR SASARAN

“ PROSENTASE DESA MAJU “

Rencana Strategis Dinas Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2016 – 2021, dengan target kinerja utama sebagai mana tabel di bawah ini:

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis DPDM

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan Desa Mandiri	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase Desa Maju	4,33%	4,55%	4,76%	4,98%	5,19%	5,41%

Target Kinerja Sasaran sebagaimana tabel diatas, merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel IV.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis RPJMD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Aman, Tentram Dan Damai Berdasarkan Nilai-Nilai Agama, Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran	Terwujudnya Desa yang Mandiri	1. Jumlah Desa Mandiri	1	4	5	6	7	8

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan sebagaimana di atas, dapat di tarik benang merah, bahwa DPMD mendukung Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut :

Tabel IV.3
Keselarasn Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
DPMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

MISI 5				
Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Teneteram Dan Damai Dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal				
Tujuan				
Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Aman, Teneteram Dan Damai Berdasarkan Nilai-Nilai Agama, Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pengurangan Kemiskinan dan Pengurangan				
Sasaran				
Terwujudnya Desa yang Mandiri				
Indikator Sasaran				
Jumlah Desa Mandiri				
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021				
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Sasaran Rencana Strategis DPDM				
Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan Desa Mandiri	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase Desa maju	$\frac{\text{Jumlah desa maju}}{\text{Jumlah KeseluruhanDesa}} \times 100\%$	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	PENANGGUNG JAWAB	
a.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	a	Prosentase peningkatan Kelompok Masyarakat Yang diberdayakan	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan selama satu tahun periode berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya (n - (n-1))}}{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan selama satu tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa
		i	Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa	Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa yang diadakan	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa
		ii	Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin yang terbantu}}{\text{Jumlah Keseluruhan Keluarga Miskin}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa
		iii	Prosentase peningkatan Bantuan Pembiayaan Infra Struktur (sarana dan Prasarana) Desa	$\frac{\text{Jumlah Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa selama satu tahun periode berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya (n - (n-1))}}{\text{Jumlah Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa selama satu tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa

Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	PENANGGUNG JAWAB	
b	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	b	Prosentase Perkembangan BUMDes aktif	$\frac{\text{Jumlah BUMDes Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan BUMDES}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
		i	Jumlah BUMDes yang terbentuk	$\frac{\text{Jumlah terbentuknya BUMDes}}{\text{Jumlah keseluruhan BUMDes}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
				Jumlah Keseluruhan BUMDes yang di bina	Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
		iii	Prosentase Pasar Desa yang berkembang	$\frac{\text{Jumlah Pasar Desa yang berkembang}}{\text{Jumlah keseluruhan Pasar Desa}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	c	Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat selama satu tahun periode berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya (n - (n-1))}}{\text{Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat selama satu tahun periode sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat
				i	Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan

Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	PENANGGUNG JAWAB	
		ii	Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu	Jumlah Keseluruhan kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu	Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat
		ii	Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat	Jumlah Keseluruhan Nilai Keswadayaan Masyarakat dalam Satu Tahun Periode Berjalan	Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat
		iii	Prosentase HIPAM aktif	$\frac{\text{Jumlah HIPAM Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan HIPAM}} \times 100\%$	Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat
d	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	d	Prosentase Desa Berkembang	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa
i		Prosentase Desa lebsite	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dikembangkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa	
ii		Prosentase LPM baik	$\frac{\text{Jumlah LPM baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan LPM}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa	
iii		Prosentase Aparatur Desa Yang diberi Bimbingan Teknis	Jumlah Jumlah Aparatur Desa Yang diberi Bimbingan Teknis	$\frac{\text{Jumlah Jumlah Aparatur Desa Yang diberi Bimbingan Teknis}}{\text{Jumlah Keseluruhan Aparatur Desa}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa
			Jumlah Keseluruhan Aparatur Desa		

Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	PENANGGUNG JAWAB	
e	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	e	Prosentase kelompok perempuan aktif	$\frac{\text{Jumlah kelompok Perempuan aktif}}{\text{Jumlah keseluruhan kelompok perempuan aktif}} \times 100\%$	Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat
		i	Prosentase PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan PKK}} \times 100\%$	Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat
		ii	Prosentase Posyandu aktif	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan Posyandu}} \times 100\%$	Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat
		iii	Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (UP2K dan UEP-SP)	$\frac{\text{Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (UP2K dan UEP-SP)}}{\text{Jumlah keseluruhan kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan (UP2K dan UEP-SP)}} \times 100\%$	Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat

Tabel IV.4.
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	KONDISI		
				AWAL	AKHIR	
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016 -2021						
Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Aman, Tentram Dan Damai Berdasarkan Nilai-Nilai Agama, Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pengurangan Kemiskinan dan Pengurangan	Mewujudkan Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Hasil Indeks Komposit dihitung dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya yang disesuaikan variabel dan indikator penilaiannya dengan nilai batas lebih besar dari 0,815	1	8	
	RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2016 - 2021 KABUPATEN LAMONGAN					
	1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Prosentase Desa maju	$\frac{\text{Jumlah desa maju}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa}} \times 100\%$	4,33% 5,41%
	a	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	a	Prosentase peningkatan Kelompok Masyarakat Yang diberdayakan	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan selama satu tahun periode berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya (n - (n-1))}}{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan selama satu tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	16,67% 50,00%

Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	KONDISI		
				AWAL	AKHIR	
		i	Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa	Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa yang diadakan	4	14
		ii	Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin yang terbantu}}{\text{Jumlah Keseluruhan Keluarga Miskin}} \times 100\%$	3,46%	45,73%
		iii	Prosentase peningkatan Bantuan Pembiayaan Infra Struktur (sarana dan Prasarana) Desa	$\frac{\text{Jumlah Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa selama satu tahun periode berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya (n - (n-1))}}{\text{Jumlah Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa selama satu tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	66,67%	16,67%

Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	KONDISI			
				AWAL	AKHIR		
	b	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	b	Prosentase Perkembangan BUMDes aktif	$\frac{\text{Jumlah BUMDes Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan BUMDES}} \times 100\%$	0,87%	3,03%
			i	Jumlah BUMDes yang terbentuk	$\frac{\text{Jumlah terbentuknya BUMDes}}{\text{Jumlah keseluruhan BUMDes}} \times 100\%$	50,00%	100,00%
					ii	Jumlah BUMDes yang dibina	Jumlah Keseluruhan BUMDes yang di bina
			ii	Prosentase Pasar Desa yang berkembang	$\frac{\text{Jumlah Pasar Desa yang berkembang}}{\text{Jumlah keseluruhan Pasar Desa}} \times 100\%$	29,52%	71,43%
	c	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	c	Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat selama satu tahun periode berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya (n - (n-1))}}{\text{Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat selama satu tahun periode sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	4,55%	14,71%
					i	Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di pedesaan	Jumlah Keseluruhan Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di pedesaan

Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	KONDISI		
				AWAL	AKHIR	
		ii	Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu	Jumlah Keseluruhan kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu	4	12
		ii	Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat	Jumlah Keseluruhan Nilai Keswadayaan Masyarakat dalam Satu Tahun Periode Berjalan	115.000.000	240.000.000
		iii	Prosentase HIPAM aktif	$\frac{\text{Jumlah HIPAM Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan HIPAM}} \times 100\%$	61,69%	67,10%
	d Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	d	Prosentase Desa Berkembang	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa}} \times 100\%$	46,10%	50,22%
i				Prosentase Desa lebsite	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dikembangkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa}} \times 100\%$	0,65%
ii		Prosentase LPM baik	$\frac{\text{Jumlah LPM baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan LPM}} \times 100\%$	1,27%	4,43%	
iii		Prosentase Aparatur Desa Yang diberi Bimbingan Teknis	$\frac{\text{Jumlah Jumlah Aparatur Desa Yang diberi Bimbingan Teknis}}{\text{Jumlah Keseluruhan Aparatur Desa}} \times 100\%$	1,27%	4,43%	

Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	KONDISI	
				AWAL	AKHIR
	e Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	e Prosentase kelompok perempuan aktif	$\frac{\text{Jumlah kelompok Perempuan aktif}}{\text{Jumlah keseluruhan kelompok perempuan aktif}} \times 100\%$	63,62%	81,75%
i Prosentase PKK aktif			$\frac{\text{Jumlah PKK Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan PKK}} \times 100\%$	80,68%	100,00%
ii Prosentase Posyandu aktif		$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan Posyandu}} \times 100\%$	78,39%	88,51%	
iii Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (UP2K dan UEP-SP)		$\frac{\text{Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (UP2K dan UEP-SP)}}{\text{Jumlah keseluruhan kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan (UP2K dan UEP-SP)}} \times 100\%$	38,89%	66,67%	

Tabel IV.4.1.
Keterkaitan dan Penyelarasan Indikator, Formulasi, Definisi Operasional, Sumber Data, dan Penetapan Target
RPJMD Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan dengan RENSTRA DPMD

Keterkaitan Sasaran Dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan dengan RENSTRA DPMD		Sasaran RPJMD : Meningkatnya Desa Mandiri										
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja								
				awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	akhir	
Jumlah Desa Mandiri	Hasil Indeks Komposit dihitung dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya yang disesuaikan variabel dan indikator penilaiannya dengan nilai batas lebih besar dari 0,815	suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen Indeks Desa Membangun (IDM) dengan nilai batas lebih besar dari 0,815	Hasil Laporan Penilaian IDM dari Pendamping Desa yang diolah pada Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa pada DPMD	0	1	4	5	6	7	8	8	
Keterkaitan Sasaran Dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan dengan RENSTRA DPMD		Sasaran RENSTRA : Meningkatnya Desa Maju										
Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja								
				awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	akhir	
Prosentase Desa Maju	Jumlah Desa Maju dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Desa di Wilayah Lamongan	suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen Indeks Desa Membangun (IDM) dengan nilai batas lebih kecil dari $\leq 0,707$	Hasil Laporan Penilaian IDM dari Pendamping Desa yang diolah pada Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa pada DPMD	0,00%	4,33%	4,55%	4,76%	4,98%	5,19%	5,41%	5,41%	

Tabel IV.4.2.
Penyelarasan Sasaran, Indikator, Formulasi, Definisi Operasional, Sumber Data, dan Penetapan Target
Dalam RENSTRA Tahun 2016 – 2021 DPMD Kabupaten Lamongan

Sasaran dan Program	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja							
					awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	akhir
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase Desa maju	Jumlah desa maju Jumlah Keseluruhan desa X 100%	Hasil Indeks Komposit dihitung dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya yang disesuaikan variabel dan indikator penilaiannya dengan nilai batas lebih kecil dari ≤ 0,707	Laporan Hasil Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM)	4,33%	4,33%	4,55%	4,76%	4,98%	5,19%	5,41%	5,41%

Sasaran dan Program	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja							
					awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	akhir
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1	$\frac{\text{Jumlah Kelompok / Masyarakat yang diberdayakan selama satu tahun periode berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya (n - (n-1))}}{\text{Jumlah Kelompok / Masyarakat yang diberdayakan selama satu tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	Segala jenis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui bantuan langsung maupun tidak langsung, pelatihan, peningkatan ketrampilan dengan mengoptimalkan segala potensi SDM dan SDA/	laporan kegiatan pada semua pelatihan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang di ruang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16,67%	16,67%	14,29%	25,00%	40,00%	42,86%	50,00%	50,00%
		a			Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa	Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa yang diadakan	Berbagai jenis pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM, TTG dan jenis usaha	Laporan Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan oleh DPMD	4	4	6	8

Sasaran dan Program	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja							
					awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	akhir
w	b	Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu $\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin yang terbantu}}{\text{Jumlah Keseluruhan Keluarga Miskin}} \times 100\%$	Pemberian bantuan langsung ataupun tidak langsung berupa uang maupun barang pada Keluarga Miskin pada desil 2, 3 dan 4	Laporan kegiatan pengentasan kemiskinan dari kegiatan bantuan untuk RTM miskin Desil 2, 3 dan 4	3,46%	3,46%	13,28%	21,39%	29,51%	37,62%	45,73%	45,73%
	ii	Prosentase peningkatan Bantuan Pembiayaan Infra Struktur (sarana dan Prasarana) Desa $\frac{\text{Jumlah Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa selama satu tahun periode berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya (n - (n-1))}}{\text{Jumlah Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa selama satu tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$	Berbagai jenis sarana dan prasarana desa dalam menunjang layanan kepentingan umum masyarakat desa	Laporan kegiatan bantuan keuangan kepada desa	66,67%	66,67%	50,00%	33,33%	25,00%	20,00%	16,67%	16,67%

Sasaran dan Program	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja								
					awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	akhir	
2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1	Prosentase Perkembangan BUMDes aktif	$\frac{\text{Jumlah BUMDes Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan BUMDes}} \times 100\%$	BUMDes yang memiliki jenis usaha dan memberikan keuntungannya pada Desa	Laporan perkembangan BUMDesa Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomian Masyarakat Desa	0,87%	0,87%	1,30%	1,73%	2,16%	2,60%	3,03%	3,03%
	a	Jumlah BUMDes yang terbentuk	$\frac{\text{Jumlah terbentuknya BUMDes}}{\text{Jumlah keseluruhan BUMDes}} \times 100\%$	Desa yang belum terbentuk BUMDes, didorong untuk mendirikan BUMDes	Laporan periodik tahunan pembentukan BUMDesa	50,00%	50,00%	62,99%	73,81%	83,55%	92,21%	100,00%	100,00%
			Jumlah BUMDesa yang dibina	Jumlah Keseluruhan BUMDesa yang dibina	BUMDes yang memiliki jenis usaha dan belum memberikan keuntungannya pada Desa	Laporan perkembangan BUMDesa Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomian Masyarakat Desa	10	10	20	30	40	50	60
	c	Prosentase Pasar Desa yang berkembang	$\frac{\text{Jumlah Pasar Desa yang berkembang}}{\text{Jumlah keseluruhan Pasar Desa}} \times 100\%$	Pasar Desa jumlah stand dan pengunjungnya bertambah	Laporan perkembangan Pasar Desa Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomian Masyarakat Desa	29,52%	29,52%	39,05%	47,62%	56,19%	64,76%	71,43%	71,43%

Sasaran dan Program	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja							
					awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	akhir
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	3 Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan Masyarakat	Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat selama satu tahun periode berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya (n – (n-1))	Keseluruhan Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa dalam 1 periode tahunan	Laporan periodik tahunan Keswadayaan Kecamatan	4,55%	4,55%	8,70%	8,00%	11,11%	13,33%	14,71%	14,71%
		$\times 100\%$										
	a	Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan	Jumlah Keseluruhan Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan	Kegiatan yang dilakukan secara bersama masyarakat di perdesaan	Laporan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	54	54	81	108	135	162	189
b	Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu	Jumlah Keseluruhan kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu	Perkumpulan / kelompok masyarakat di perdesaan yang berberak dalam menjaga seni dan budaya lokal	Laporan Kegiatan kelompok budaya dan adat di perdesaan	4	4	6	8	9	10	12	12

Sasaran dan Program	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja									
					awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	akhir		
	c	Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat	Jumlah Keseluruhan Nilai Keswadayaan Masyarakat dalam Satu Tahun Periode Berjalan	Keseluruhan Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa dalam 1 periode tahunan	Laporan periodik tahunan Keswadayaan Kecamatan	115.000.000	115.000.000	140.000.000	165.000.000	190.000.000	215.000.000	240.000.000	240.000.000	
	d	Jumlah HIPAM aktif	$\frac{\text{Jumlah HIPAM Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan HIPAM}} \times 100\%$	Kelembagaan HIPAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik	Laporan Kegiatan HIPAM	61,69%	61,69%	62,77%	63,85%	64,94%	66,02%	67,10%	67,10%	
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	4	Prosentase Desa Berkembang	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang}}{\text{Jumlah Keseluruhan desa}} \times 100\%$	Hasil Indeks Komposit dihitung dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya yang disesuaikan variabel dan indikator penilaiannya dengan nilai batas lebih kecil dari $\leq 0,707$	Laporan Hasil Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM)	46,10%	46,10%	47,62%	48,27%	48,92%	49,57%	50,22%	50,22%

Sasaran dan Program	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja								
					awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	akhir	
	a	Prosentase Desa lebsite	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dikembangkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa}} \times 100\%$	pola pengembangan dan peningkatan sumber daya desa yang berpotensi untuk di kembangkan ke arah keunggulan desa	Laporan Hasil Kegiatan Labsite	0,65%	0,65%	1,30%	2,38%	3,03%	3,68%	4,33%	4,33%
	b	Prosentase LPM baik	$\frac{\text{Jumlah LPM baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan LPM}} \times 100\%$	Rencana kegiatan hasil lomba LPM Desa (kategori juara 1,2 dan 3) di wilayah kabupaten lamongan	Hasil Laporan Kegiatan lomba LPM	1,27%	1,27%	1,90%	2,53%	3,16%	3,80%	4,43%	4,43%
	c	Prosentase Aparatur Desa Yang diberi Bimbingan Teknis	$\frac{\text{Jumlah Jumlah Aparatur Desa Yang diberi Bimbingan Teknis}}{\text{Jumlah Keseluruhan Aparatur Desa}} \times 100\%$	Kelembagaan HIPPAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik	Laporan Kegiatan HIPPAM	1,27%	1,27%	1,90%	2,53%	3,16%	3,80%	4,43%	4,43%

Sasaran dan Program	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja							
					awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	akhir
5 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	5	Prosentase kelompok perempuan aktif $\frac{\text{Jumlah kelompok Perempuan aktif}}{\text{Jumlah keseluruhan kelompok perempuan aktif}} \times 100\%$	Semua individu berjenis kelamin perempuan berkumpul dan berkelompok serta berpartisipasi dalam pembangunan	semua laporan kegiatan OPD yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan	63,62%	63,62%	67,42%	71,22%	75,06%	78,50%	81,75%	81,75%
	d	Prosentase PKK aktif $\frac{\text{Jumlah PKK Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan PKK}} \times 100\%$	Rencana kegiatan evaluasi pengembangan kelembagaan PKK aktif dalam pokja I, II, III dan IV	• Hasil Laporan Kegiatan PKK Kabupaten pokja I, II, III dan IV	80,68%	80,68%	86,06%	91,43%	96,81%	99,20%	100,00%	100,00%
	e	Prosentase Posyandu aktif $\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan Posyandu}} \times 100\%$	Rencana kegiatan evaluasi pengembangan kelembagaan PKK aktif dalam pokja I, II, III dan IV	Hasil Laporan Kegiatan PKK Kabupaten pokja I, II, III dan IV	78,39%	78,39%	80,34%	82,30%	84,31%	86,38%	88,51%	88,51%

Sasaran dan Program	Formulasi Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan	Formulasi Indikator	Difinisi Operasional	Sumber Data	Target Kinerja							
					awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	akhir
	f	<p>Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (UP2K dan UEP-SP)</p> $\frac{\text{Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (UP2K dan UEP-SP)}}{\text{Jumlah keseluruhan kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan (UP2K dan UEP-SP)}} \times 100\%$	kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan yang diberi supervisi, dalam bentuk pelatihan SDM maupun jenis usaha	Laporan kegiatan dan perkembangan Usaha Ekonomi Produktif Perempuan	38,89%	38,89%	44,44%	50,00%	55,56%	61,11%	66,67%	66,67%

Tabel IV.5. Arah kebijakan dan Strategis

MISI 5					
Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram Dan Damai Dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal					
Tujuan					
Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Aman, Tentram Dan Damai Berdasarkan Nilai-Nilai Agama, Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pengurangan Kemiskinan dan Pengurangan					
Sasaran					
Terwujudnya Desa yang Mandiri					
Indikator Sasaran					
Jumlah Desa Mandiri					
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Rencana Strategis DPDM					
Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan Desa Mandiri	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase Desa maju	Penguatan Indeks Komposit dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya pada variabel dan indikator penilaiannya	Penguatan Indeks Komposit dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya dengan mempertimbangkan variabel dan indikator penilaiannya sebagai prioritas prmrbrin stimulasi program dan kegiatan yang dibutuhkan	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa

RPJMD
Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNG JAWAB
	1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1 Prosentase peningkatan Kelompok / Masyarakat Yang diberdayakan	1 Peningkatan dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Peningkatan Kualitas Hidup melalui program pelatihan SDM, SDA, teknologi tepat guna dan pemberian bantuan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa
		a Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa	a Pengembangan ilmu pengetahuan, kemampuan tehnik dan manajerial kelompok usaha di perdesaan	a Pelatihan SDM dalam aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan manajerial dalam kelomok usaha di perdesaan berbasis potensi lokal	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa
		b % Jumlah Keluarga Miskin Yang terbantu	b Pengurangan Beban Hidup Keluarga Miskin	b Pemberian bantuan alat/peralatan dan modal usaha yang disesuaikan dengan kondisi keluarga miskin	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa
		c Prosentase peningkatan Bantuan Pembiayaan Infra Struktur (sarana dan Prasarana) Desa	c Peningkatan Infra Struktur Desa	c Pemberian Banrtuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa untuk pembanguan Infra Struktur Desa	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa

Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNG JAWAB
	2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1 Prosentase Perkembangan BUMDes aktif	2 Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Perdesaan	2 Peningkatan Peran BUMDes dalam menggerakkan roda perekonomian desa	Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
		a Jumlah BUMDes yang terbentuk	a Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	a Pendirian BUMDes	Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
		b Jumlah BUMDes yang dibina	b Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Perdesaan	b Peningkatan Peran BUMDes	Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
		c Prosentase Pasar Desa yang berkembang	c Pengembangan dan Peningkatan layanan Pasar Desa	c Pendirian dan Pengembangan Pasar Desa	Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
	3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	3 Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan Masyarakat	3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dengan swadaya	Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat
		a Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan	a Menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong Dalam pembangunan desa	a Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat
		b Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu	b Peningkatan Peran kelompok budaya dan adat di perdesaan	b Pemberian Bantuan Kepada kelompok budaya dan adat di perdesaan	

Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNG JAWAB
		c Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat	c Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	c Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dengan swadaya	Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat
		d Jumlah HIPAM aktif	d	d	Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat
	4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	4 Prosentase Desa Berkembang	4 Penguatan Indeks Komposit dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya pada variabel dan indikator penilaiannya	4 Penguatan Indeks Komposit dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya dengan mempertimbangkan variabel dan indikator penilaiannya sebagai prioritas pmerbrin stimulasi program dan kegiatan yang dibutuhkan	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa
		a Prosentase Desa lebsite	a Pengembangan Sistem Administrasi Desa Berbasis Tehnologi Informatika	a Pengembangan Sistem Aplikasi Administrasi Desa	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa
		b Prosentase LPM baik	b Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	b Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM & KPMD)	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa
		c Prosentase Aparatur Desa Yang diberi Bimbingan Teknis	c Pemberdayaan SDM Aparatur Desa	c Pelatihan SDM Aparatur Desa	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa

Tujuan	Sasaran dan Program	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNG JAWAB
	5 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	5 Prosentase kelompok perempuan aktif	5 Pengembangan Peran kelompok Perempuan aktif dalam pembangunan desa	5 Penguatan Peran Perempuan keterlibatan pembangunan di perdesaan	Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat
		a Prosentase PKK aktif	a Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi perempuan di desa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	a Penguatan SDM dan Kelembagaan perempuan di desa	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa
		b Prosentase Posyandu aktif	b Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi perempuan di desa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	b Penguatan SDM dan Kelembagaan perempuan di desa	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa
		c Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (UP2K dan UEP-SP)	c Pengembangan Peran Perempuan Perdesaan dalam Usaha Ekonomi	c Penguatan Peran Perempuan dalam kelompok usaha guna peningkatan pendapatan keluarga	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam mencapai visi misi 5 (lima) tahun kedepan yang terarah efisien, dan efektif perlu direncanakan kedalam program prioritas baik urusan wajib maupun pilihan. Proyeksi proposal belanja untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selama lima tahun kedepan sebagaimana table dibawah ini

Table 5.1. RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA dan PENDANAAN INDIKATIF

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	SKPD Penanggung-jawab	
			2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase peningkatan Kelompok Masyarakat Yang diberdayakan	16,67%	14,29%	750.000.000	25,00%	825.000.000	40,00%	907.500.000	42,86%	998.250.000	50,00%	1.098.075.000	50,00%	4.578.825.000	DINAS PMD
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase Perkembangan BUMDes Aktif	0,87%	1,30%	560.000.000	1,73%	616.000.000	2,16%	677.600.000	2,60%	745.360.000	3,03%	819.896.000	3,03%	3.418.856.000	DINAS PMD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung-jawab
			2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp	
			Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp			
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase peningkatan Nilai Keswadayaan Masyarakat	4,55%	8,70%	850.000.000	8,00%	935.000.000	11,11%	1.028.500.000	13,33%	1.131.350.000	14,71%	1.244.485.000	14,71%	5.189.335.000	DINAS PMD
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Desa Berkembang	46,10%	47,62%	335.000.000	48,27%	463.500.000	48,92%	509.850.000	49,59%	560.835.000	50,22%	616.918.500	50,22%	2.486.103.500	DINAS PMD
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Prosentase Kelompok Perempuan aktif	63,62%	67,42%	1.345.000.000	71,22%	1.479.500.000	75,06%	1.627.450.000	78,50%	1.790.195.000	81,75%	1.969.214.500	100,00%	8.211.359.500	DINAS PMD

Tabel 5.2
Penyelarasan Program / Kegiatan , Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja OPD	Lokasi			
			W	J	U	R			P	R	K	G	Target	Sesudah Perubahan	Target	Sesudah Perubahan			Target	Rp							
																											7
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Mewujudkan Desa Mandiri	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase Desa maju							4,33 %	4.632.480.000	4,55 %	5.029.193.200	4,76 %	5.645.912.520	4,98 %	6.202.253.772	5,19 %	6.822.479.149	5,41 %	7.504.727.064	5,41 %	35.837.013.705					
			1	0	0	0	0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Unit Kerja Internal yang terlayani dengan Baik	80%	640.948.000	80%	660.693.200	80%	726.762.520	80%	799.438.772	80%	879.382.649	80%	967.320.914	80%	4.674.546.055		Dinas PMD
			1	0	0	0	0	0	1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Jasa Layanan Perkantoran	6 Kegiatan	385.948.000	6 Kegiatan	413.283.200	6 Kegiatan	454.611.520	6 Kegiatan	500.072.672	6 Kegiatan	550.079.939	6 Kegiatan	605.087.933	6 Kegiatan	2.909.083.264	Bagian Umum	
			1	0	0	0	0	0	2	Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	Jumlah Barang Pakai Habis Perkantoran	6 Kegiatan	200.000.000	6 Kegiatan	192.410.000	6 Kegiatan	211.651.000	6 Kegiatan	232.816.100	6 Kegiatan	256.097.710	6 Kegiatan	281.707.481	6 Kegiatan	1.374.682.291	Bagian Umum	

1	0	0	0	0	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	173 Perjalanan Dinas	55.000.000	173 Perjalanan Dinas	55.000.000	173 Perjalanan Dinas	60.500.000	173 Perjalanan Dinas	66.550.000	173 Perjalanan Dinas	73.205.000	173 Perjalanan Dinas	80.525.500	173 Perjalanan Dinas	390.780.500	Bagian Umum
1	0	0	0		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	% sarana Prasarana aparatur dengan kondisi baik	80%	492.000.000	80%	459.000.000	80%	504.900.000	80%	547.140.000	80%	601.854.000	80%	662.039.400	80%	3.266.933.400	Dinas PMD
1	0	0	0	0	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Kantor	7 Notebook, 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC, 4 Lemari Besi	154.000.000	7 Notebook, 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC, 4 Lemari Besi	154.000.000	7 Notebook, 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC, 4 Lemari Besi	169.400.000	7 Notebook, 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC, 4 Lemari Besi	186.340.000	7 Notebook, 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC, 4 Lemari Besi	204.974.000	7 Notebook, 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC, 4 Lemari Besi	225.471.400	7 Notebook, 2 Printer, 3 Komputer Dekstop, 9 AC, 4 Lemari Besi	1.094.185.400	Bagian Umum
1	0	0	0	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 unit taman, 1 pencetakan gedung, 1 perbaikan berkala gedung	125.000.000	1 unit taman, 1 pencetakan gedung, 1 perbaikan berkala gedung	85.000.000	1 unit taman, 1 pencetakan gedung, 1 perbaikan berkala gedung	93.500.000	1 unit taman, 1 pencetakan gedung, 1 perbaikan berkala gedung	102.850.000	1 unit taman, 1 pencetakan gedung, 1 perbaikan berkala gedung	113.135.000	1 unit taman, 1 pencetakan gedung, 1 perbaikan berkala gedung	124.448.500	1 unit taman, 1 pencetakan gedung, 1 perbaikan berkala gedung	643.933.500	Bagian Umum

								ng, 5 toilet'		ng, 5 toilet'		ng, 5 toilet'		ng, 5 toilet'		ng, 5 toilet'		ng, 5 toilet'				
1	0	0	0	0	0	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	120.000.000	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	125.000.000	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	130.000.000	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	143.000.000	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	157.300.000	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	173.030.000	100 Paket Perbaikan AC, Perbaikan Ruang Kadin, 1 Paket Perbaikan Ruang Sekdin, 1 Paket Pengecatan Gedung Luar	848.330.000	Bagian Umum
1	0	0	0	0	0	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor, 5 Mobil Operasional, Service,	93.000.000	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor, 5 Mobil Operasional, Service,	95.000.000	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor, 5 Mobil Operasional, Service,	104.500.000	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor, 5 Mobil Operasional, Service,	114.950.000	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor, 5 Mobil Operasional, Service,	126.445.000	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor, 5 Mobil Operasional, Service,	139.089.500	1 Unit Mobil Jabaran, 13 Motor, 5 Mobil Operasional, Service,	672.984.500	Bagian Umum

1	0	0	1		Progr am Penge mban gan Lemb aga Ekono mi Pedes aan	% Jumlah Perkemb angan BUMDes Aktif	21,65 %	470.000 .000	37,88 %	560.000 .000	54,11 %	616.000 .000	64,94 %	677.600 .000	75,76 %	745.36 0.000	21,58 %	819.89 6.000	21,58 %	3.888.85 6.000		Din as PM D
1	0	0	1	0	Fasilit asi Pemb inaan dan Penge mbang an BUMD es	Jumlah BUMDes yang dikemb angkan	10 BUM Des	300.000 .000	20 BUM Des	400.000 .000	30 BUM Des	440.000 .000	40 BUM Des	484.000 .000	50 BUM Des	532.40 0.000	60 BUM Des	585.64 0.000	60 BUM Des	2.742.04 0.000	Bidan g Lemb aga Ekon omi Masy araka t Desa	
1	0	0	1	0	Fasilit asi Penge mbang an dan Pemb inaan Lemba ga Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang dibina	10 Pasa r Desa	170.000 .000	20 Pasa r Desa	160.000 .000	30 Pasa r Desa	176.000 .000	40 Pasa r Desa	193.600 .000	50 Pasa r Desa	212.96 0.000	60 Pasa r Desa	234.25 6.000	60 Pasa r Desa	1.146.81 6.000	Bidan g Lemb aga Ekon omi Masy araka t Desa	
												-										
1	0	0	1		Progr am Penin gkata n Partisi pasi Masya rakat Dalam Memb angun Desa	Prosent ase Nilai Keswada yaan Masyarak at	4,55 %	845.000 .000	8,70 %	850.000 .000	8,00 %	935.000 .000	11,11 %	1.028.5 00.000	13,33 %	1.131. 350.00 0	14,71 %	1.244. 485.00 0	14,71 %	6.034.33 5.000		Din as PM D

			1	0	0	1	1	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Tni Manunggal Membangun Desa (Tmm d)	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	220.000.000	1 Kegiatan	242.000.000	1 Kegiatan	266.200.000	1 Kegiatan	292.820.000	1 Kegiatan	1.221.020.000	Bidang Partisipasi dan sosial Budaya Masyarakat Desa
			1	0	0	1	1	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong di perdesaan	Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan	27 Desa	-	54 Desa	100.000.000	81 Desa	110.000.000	108 Desa	121.000.000	135 Desa	133.100.000	162 Desa	146.410.000	162 Desa	610.510.000	Bidang Partisipasi dan sosial Budaya Masyarakat Desa
			1	0	0	1	1	Pengumpulan, Updating Dan Analisis Data Swadaya Masyarakat	Jumlah Nilai Keswadayaan dalam pembangunan desa	474 desa / kelurahan	30.000.000	474 desa / kelurahan	30.000.000	474 desa / kelurahan	33.000.000	474 desa / kelurahan	36.300.000	474 desa / kelurahan	39.930.000	474 desa / kelurahan	43.923.000	474 desa / kelurahan	213.153.000	Bidang Partisipasi dan sosial Budaya Masyarakat Desa
			1	0	0	1	1	Fasilitasi Penguatan Adat Istiadat, Tradisi Dan	Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu	4 Kelompok	-	4 Kelompok	30.000.000	4 Kelompok	33.000.000	4 Kelompok	36.300.000	4 Kelompok	39.930.000	4 Kelompok	43.923.000	4 Kelompok	183.153.000	Bidang Partisipasi dan sosial Budaya Masyarakat

					Budaya Masyarakat																araka t Desa	
1	0 2	0 7	1 7	1 9	Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera (Jalin Matra)	Jumlah keluarga miskin yang terbantu	250 orang	100.000.000	500 orang	75.000.000	750 orang	82.500.000	1000 orang	90.750.000	1750 orang	99.825.000	2500 orang	109.807.500	3250 orang	557.882.500	Bidang Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	
1	0 2	0 7	1 8		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	% desa berkembang	46,10 %	250.000.000	47,62 %	335.000.000	48,27 %	463.500.000	48,92 %	509.850.000	49,57 %	560.835.000	50,22 %	616.918.500	5,41 %	2.736.103.500	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat	Dinas PMD
1	0 2	0 7	1 8	1 6	Labsite Model Pengembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang dikembangkan				-	3 Desa	95.000.000	6 Desa	104.500.000	9 Desa	114.950.000	12 Desa	126.445.000	15 Desa	440.895.000	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat	
1	0 2	0 7	1 8	1 7	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Jumlah Desa yang di monev	27 kecamatan/104 desa	-	27 kecamatan/104 desa	50.000.000	27 kecamatan/104 desa	55.000.000	27 kecamatan/104 desa	60.500.000	27 kecamatan/104 desa	66.550.000	27 kecamatan/104 desa	73.205.000	27 kecamatan/104 desa	305.255.000	Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan	

1	0	0	1	3	Pemb erdaya an Lemba ga Dan Organi sasi Masya rakat Pedesa aan	Jumlah LPM baik	27 LPM	100.000 .000	54 LPM	80.000. 000	81 LPM	88.000. 000	108 LPM	96.800. 000	135 LPM	106.48 0.000	162 LPM	117.12 8.000	189 LPM	588.408. 000	Bidan g Peme rintah an dan Kele mbag aan Masy araka t	
																				-		
1	0	0	1		Progr am Penin gkata n Peran Perem puan Di Perde saan	% Jumlah Kelompo k Perempu an aktif	63,62 %	1.395.0 00.000	67,42 %	1.345.0 00.000	71,22 %	1.479.5 00.000	75,06 %	1.627.4 50.000	78,50 %	1.790. 195.00 0	81,75 %	1.969. 214.50 0	100,0 0%	9.606.35 9.500		Din as PM D
1	0	0	1	0	Pelatih an Perem puan Di Perde saan Dalam Bidan g Usaha Ekono mi Produ ktif	Jumlah Peserta Pelatihan	54 peser ta	50.000. 000	108 peser ta	45.000. 000	162 peser ta	49.500. 000	206 peser ta	54.450. 000	260 peser ta	59.895 .000	314 peser ta	65.884 .500	314 peser ta	324.729. 500	Bidan g Partis ipasi dan sosial Buda ya Masy araka t Desa	
1	0	0	1	0	Pembi naan Kader PKK	Jumlah PKK yang dibina	502 lemb aga	500.000 .000	502 lemb aga	750.000 .000	502 lemb aga	825.000 .000	502 lemb aga	907.500 .000	502 lemb aga	998.25 0.000	502 lemb aga	1.098. 075.00 0	502 lemb aga	5.078.82 5.000	Bidan g Partis ipasi dan sosial Buda ya Masy araka	

					(Up2K)																ya Masy araka t Desa		
		1	0	0	1	1	Fasilit asi Pergul iran simpa n Pinjam Untuk Perem puan (SPP) Berba sis Pemb erdaya an Masya rakat	Jumlah Kegiatan	1 Kegi atan	300.000 .000	1 Kegi atan	100.000 .000	1 Kegi atan	110.000 .000	1 Kegi atan	121.000 .000	1 Kegi atan	133.10 0.000	1 Kegi atan	146.41 0.000	1 Kegi atan	910.510. 000	Bidan g Pemb erdaya an dan Peng emba ngan Sumb er Daya Desa
							Jumlah Keseluruhan			4.632.4 48.000		5.029.1 93.200		5.645.9 12.520		6.202.2 53.772		6.822. 479.14 9		7.504. 727.06 4		35.472.0 32.985	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dan RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capai program terhadap tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berkenaan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selanjutnya disajikan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel VII.1. INDIKATOR KINERJA BPM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Baseline) Tahun 2015	Target					SKPD Penanggung Jawab	
				2016	2017	2018	2019	2020		2021
5	5.1	Jumlah Desa Mandiri	0	1	4	5	6	7	8	Opd yang membawai urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

BAB VII PENUTUP

Perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis yang memberikan arah dalam menentukan keputusan operasionalisasi dan mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan strategis (Renstra) Hasil Review Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis RPJM Daerah bagi unit kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif seret berkelanjutan dalam menjaga terintegrasinya konsistensi antara RPJMD dan RKPD tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan, sehingga dapat mendukung perwujudan hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



KHUSNUL YAQIN , S.Si

Pembina

NIP. 19670524 199302 1 004